

KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES X/2013

Pendidikan Nasional dan Kearifan Timur: Menimbang Paradigma Alternatif dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Rabu, 15 Mei 2013, 09:00 – 13:00

Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP, Universitas Indonesia – Depok

RUMUSAN

oleh Nursamsiah Asharini Moenandar-Rifqy, Msi, Universitas Bina Nusantara

1. Pergeseran dunia dalam memandang posisi manusia sebagai makhluk sosial dari obyek dari sistem yang berfungsi, menjadi subyek yang mampu mengubah lingkungan sesuai kebutuhan dirinya, diiringi dengan perubahan demografis dan sosiokultural yang diakibatkan oleh kecanggihan teknologi yang memudahkan komunikasi antara penduduk belahan dunia.
2. Kemudahan komunikasi dan penyebaran informasi tanpa pengetahuan dan kemampuan setara pada penduduk belahan bumi akan menimbulkan hegemoni baru dari pihak yang memiliki keunggulan pengetahuan dan kemampuan.
3. Teknologi juga telah mengubah hubungan antar pribadi. Orang menjadi tidak peduli dengan orang lain, karena kebutuhannya telah terpenuhi tanpa harus saling nyata terhubung.
4. Sejarah menunjukkan bahwa kebudayaan di Indonesia merupakan campuran dari berbagai budaya, antara lain, budaya penduduk asli dengan India, China, Arab, dan Eropa. Kemampuan untuk menerima budaya lain dalam kebudayaannya merupakan kekuatan Indonesia, yang menyebabkan Indonesia tetap hadir di dunia.
5. Guna menghadapi tantangan dan memanfaatkan posisi manusia sebagai subyek, sebagai Negara multikultur kebijakan pendidikan nasional Indonesia harus
 - (a) memperhatikan aspek sosial budaya dari berbagai penduduk yang tersebar dari Barat hingga ke Timur,
 - (b) mempelajari sejarah panjang bangsa;
 - (b) membangun individu yang multikultur yang memiliki kesadaran kolektif sebagai sebuah Bangsa.
6. Kearifan Timur yang mengutamakan kesempurnaan diri, dipadu oleh filsafat barat yang mendorong kemampuan meneliti untuk menguasai dunia luar, serta kearifan budaya Indonesia yang multikultur harus menjadi falsafah dasar kebijakan pendidikan nasional.
7. Pelaksanaan kebijakan nasional menjadi tanggung jawab setiap orang, dan institusi, bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan harus diwujudkan dalam berbagai gagasan, kegiatan, kebijakan, maupun perilaku publik